

Mengabdikan Dengan Integritas

MASUKNYA KOMODITI AYAM KARKAS BEKU DALAM SRG



FEBRUARI 2021



Dari Redaksi

Pembaca **Buletin Bappebti** yang budiman,

Selamat Tahun Baru 2021. Tahun demi tahun terus berjalan, Buletin Bappebti juga terus terbit untuk memenuhi kebutuhan informasi tentang kegiatan yang dilakukan oleh Bappebti dan perkembangan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang serta pasar lelang komoditi. Insya Allah kami akan setia mengunjungi Anda setiap bulannya.

Di awal tahun ini kami menyajikan semangat dan optimisme Bappebti dalam situasi yang masih diliputi kecemasan akibat pandemi Covid-19. Seperti diketahui tahun 2020 di tengah bisnis yang umumnya mengalami kontraksi, transaksi di bursa PBK justru meningkat signifikan. Begitu juga dengan SRG makin bertambah komoditi yang diresi-gudangkan dengan masuknya komoditi ikan dan ayam karkas sehingga manfaatnya lebih luas dirasakan oleh petani/ produsen dan pelaku lainnya. Sementara pasar lelang komoditi (PLK) juga terus bergerak dengan sistem lelang *online*. Optimisme ini kami angkat dalam berita utama tentang Outlook Bappebti 2021.

Selain itu informasi aktual lainnya kami hadirkan dalam rubrik Aktualita dan Agenda Foto tentang kegiatan yang diselenggarakan oleh Bappebti. Kami juga melakukan wawancara khusus dengan Direktur Utama PT Monex Investindo Futures, Ferhard Anas, yang asyik menjelaskan tentang transaksi perdagangan berjangka yang menjadi alternatif investasi menarik, termasuk bagi kalangan milenial yang terus mencari celah bisnis. Jangan lewatkan juga rubrik Profil Komoditi, Analisis dan yang lainnya.

Pembaca yang budiman, semoga kehadiran kami setiap bulannya memberi manfaat bagi Anda. Kepada Anda yang ingin memberi masukan kepada Redaksi **Buletin Bappebti** silakan hubungi kami melalui email: humas.bappebti@kemendag.go.id atau sms center 0811-1109-901, (021) 31924744, (021) 31923204.

Tim Redaksi

Penanggung Jawab: Sidharta Utama, **Redaktur:** Nusa Eka, **Penyunting/Editor:** Sentot Kamaruddin, Muflihah Widiyanti, Apriyanto, **Fotografer:** Gita Regina Napitupulu, Hendra Gunawan, **Sekretaris:** Deni Usep Sutisna, **Alamat Redaksi:** Gedung Bappebti Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat.

f Bappebti Kemendag
@InfoBappebti
@Bappebti

SMS Center BAPPEBTI
0811-1109-901

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail : humas.bappebti@kemendag.go.id

DAFTAR ISI

BERITA UTAMA



WAWANCARA

4

24



PROFIL KOMODITI

28

RESI GUDANG	10
PASAR BERJANGKA	12
AGENDA FOTO	14
AKTUALITA	18
ENGLISH CORNER	22
ANALISIS	29
REGULASI	30

Bappebti Gencarkan Literasi

Menghadapi pandemi Covid-19 yang berdampak pada pembatasan kegiatan luar ruang, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencari terobosan agar sosialisasi program kerja dan literasi tentang perdagangan berjangka komoditi tetap bisa berlangsung. Literasi melalui daring/*online* menjadi pilihan utama. Maka sejak pertengahan 2020 literasi secara virtual ini gencar dilakukan untuk mencapai sasaran masyarakat dan pihak terkait lainnya. Sementara sosialisasi dan literasi langsung secara tatap muka dikurangi guna mencegah penularan virus Covid-19.



Sidharta Utama

Kepala Bappebti

Pandemi Covid-19 yang mendera sejangat bumi membuat pola hidup masyarakat mengalami perubahan dan menyesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Tak terkecuali dunia perdagangan, dalam hal ini perdagangan berjangka komoditi. Covid-19 membuat orang merasa cemas. Wabah ini menyebarkan rasa takut sampai ke relung-relung ruangan transaksi perdagangan. Tapi ancaman Covid yang merebak di Indonesia sejak sekitar Maret 2020 lalu justru memacu berbagai pihak untuk mencari solusi.

Berbagai lembaga pemerintah dan kementerian, termasuk Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan juga mencari solusi karena dengan pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diterapkan untuk mencegah penularan virus Covid-19, menyebabkan orang membatasi ruang gerak mereka. Salah satu jalan keluar yang menjadi pilihan adalah melakukan kegiatan dengan memanfaatkan teknologi internet yang saat ini sudah berkembang semakin baik.

Komunikasi virtual menjadi alternatifnya. Aktivitas literasi yang pada kondisi sebelum Covid-19 berlangsung secara tatap muka di hotel, gedung pertemuan, atau bahkan gudang SRG saat dilakukan kunjungan ke daerah-daerah, juga bergeser dengan menggunakan *Zoom Meeting*, sebuah aplikasi komunikasi yang saat ini populer digunakan. Literasi virtual ini menjadi sering dilakukan melihat animo masyarakat yang terus makin meningkat.

Istilah literasi sendiri dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *literacy*. Secara etimologi berasal dari bahasa Latin *literatus*, yang berarti orang yang belajar. Literasi yang dilakukan oleh Bappebti meliputi bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), Pasar Lelang Komoditi (PLK) dan juga materi lainnya terkait dengan tugas dan wewenang Bappebti.

Bagi Bappebti literasi merupakan bagian kegiatan yang sangat penting dan strategis, sebagaimana tercantum dalam arah kebijakan dan strategis untuk meningkatkan pemanfaatan PBK, SRG dan PLK pada poin 5. Disebutkan dalam Renstra Bappebti 2020-2024, dalam rangka mencapai arah kebijakan peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan PBK, SRG, dan PLK, maka strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan perdagangan berjangka
2. Meningkatkan pemanfaatan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas
3. Meningkatkan sinergitas Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang Komoditas, dan PBK
4. Meningkatkan dukungan Legislasi, Pengawasan, Penindakan dan Litigasi terkait PBK, SRG, dan PLK
5. Meningkatkan literasi kepada masyarakat dan pelaku PBK, SRG, dan PLK
6. Meningkatkan sinergi pusat-daerah dalam pemanfaatan SRG dan PLK

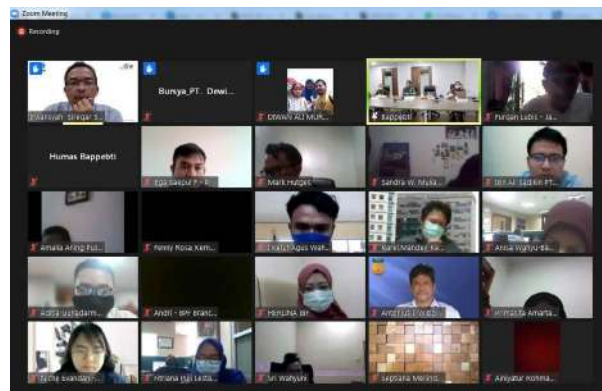


Foto: Bagian KIP

Kepala Bappebti **Sidharta Utama** menyatakan akan menggalakkan literasi melalui virtual, karena dengan menggunakan teknologi internet saat ini orang yang memberi pengajaran dengan orang yang menerima pengajaran dapat bertatap muka secara langsung melalui media internet. *“Tentu saja literasi ini harus ditingkatkan dan penggunaan sarana teknologi digital dengan literasi secara online sudah sangat dimungkinkan dan bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Makanya hal ini sudah menjadi program kerja dari Bappebti tahun ini untuk meningkatkan literasi masyarakat berbasis online. Saya minta literasi online ini ditingkatkan frekuensinya. Begitu juga Bappebti bisa memproduksi konten-konten literasi yang bisa ditayangkan di Youtube, sehingga kapan pun masyarakat bisa belajar tentang industri SRG, PBK dan PLK,”* ujar Kepala Bappebti Sidharta Utama.

Kepala Bappebti meminta agar setiap acara literasi melalui aplikasi *Zoom Meeting* ditampilkan di website Bappebti, sehingga masyarakat bisa mengaksesnya setiap saat. Dengan cara ini, menurut Kepala Bappebti, beban di Bappebti bisa menjadi lebih ringan. Masyarakat tidak harus datang pada hari ketika ada pelatihan secara fisik, tapi konten literasi *online* bisa *diposting* di media sosial resmi Bappebti, sehingga bisa diakses kapan pun oleh masyarakat.

Literasi melalui *zoom* ini dinilai lebih efisien karena peserta memperoleh kesempatan bertanya langsung ke narasumber yang berkompeten. Seperti dikemukakan Kepala Bagian Kerjasama dan Informasi Publik (KIP) Bappebti, **Sentot Kamaruddin**, banyak peserta yang dalam literasi tatap muka tidak berani tampil bertanya langsung, dalam acara literasi virtual berani mengajukan

pertanyaan ataupun pendapatnya. Ini merupakan hal yang positif. *“Bisa saja kalau offline mereka tidak percaya diri. Kalau melalui zoom mereka berani bertanya. Nah, saking banyaknya peserta yang ingin bertanya dan mengajukan pendapat, mengakibatkan literasi seringkali tidak selesai sesuai jadwal yang kita rencanakan semula. Tapi kami memaklumi hal tersebut. Bagi kami juga tidak terlalu jadi masalah, karena dari segi biaya tidak terlalu banyak tambahannya,”* ujar Sentot.

Memang dari sekian kali literasi virtual dilakukan, rata-rata berlangsung molor satu hingga dua jam, karena banyaknya peserta yang merasa penasaran dengan materi yang disampaikan. Bayangkan jika hal ini dilakukan secara *offline* dalam pertemuan di hotel atau gedung pertemuan, tentu nyaris tidak bisa dilakukan. Mengingat waktu kegiatan sudah dipatok oleh pihak gedung, sehingga walaupun terjadi penambahan waktu akan dikenakan biaya tambahan yang jumlahnya lumayan besar. Karena itulah banyak hal positif dari kegiatan literasi secara virtual atau *online* ini.

Dalam hal penyelenggaraan literasi digital ini Sentot mengaku tidak menemui banyak masalah. Koordinasi dengan narasumber yang sebagian besar adalah pejabat di Bappebti juga lancar-lancar saja. Sementara hubungan baik dengan beberapa universitas yang sudah terbina saat kondisi normal, pada masa pandemi Covid-19 ini malah dirasakan lebih erat. Karena melalui literasi yang digelar oleh Bappebti, mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi yang biasa bekerjasama dengan Bappebti justru memperoleh materi perkuliahan yang sangat besar manfaatnya, terkait dengan perdagangan berjangka komoditi.

Literasi PBK

Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) merupakan salah satu bidang pengawasan dan juga dikembangkan oleh Bappebti. Dalam kesempatan literasi mengenai PBK, Kepala Bappebti menjelaskan bahwa terdapat 2 jenis transaksi, yakni transaksi multilateral dan transaksi bilateral (SPA-Sistem Perdagangan Alternatif).

Tren nilai transaksi multilateral dibanding dengan SPA sejak tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan bahwa kenaikan transaksi SPA jauh lebih tinggi dibandingkan transaksi multilateral. Data Bappebti menunjukkan nilai transaksi SPA pada 2016 sebesar Rp77 triliun. Tahun 2020 sudah naik 2,5 kali lipat mencapai Rp178 triliun. Secara nominal naiknya mencapai Rp101 triliun. Sedangkan transaksi multilateral tahun 2016 hanya mencapai Rp18 triliun. Tahun 2020 nilainya hanya naik 10 persen menjadi Rp20 triliun. Secara nominal kenaikannya hanya Rp2 triliun. Jadi kenaikan transaksi SPA 50 kali lipat lebih tinggi. Kalau kita lihat tren nilai transaksi multilateral dibanding dengan SPA sejak tahun 2016 hingga 2020, kenaikan transaksi SPA jauh lebih tinggi dibandingkan transaksi multilateral.

“Masalahnya, sebagian besar pemahaman masyarakat atas transaksi di PBK sangat minim. Padahal bertransaksi di PBK ini risikonya sangat tinggi baik di SPA maupun multilateral. Misalnya, dengan berinvestasi Rp10 juta hingga Rp 100 juta kalau misalnya kemudian si investor mengambil posisi yang salah bisa saja dalam waktu satu atau dua bulan hilang semuanya (loss). Ini berbeda kalau melakukan jual beli saham di lantai bursa efek,” ujar Kepala Bappebti, Sidharta Utama.

Jadi dengan risiko yang begitu tinggi, ditambah dengan pemahaman masyarakat yang rendah akan resiko-

resiko di bidang PBK, apabila dalam dalam bertransaksi terjadi loss dan investasinya merugi, maka ini akan menimbulkan kesalahpahaman dan meningkatnya pengaduan masyarakat.

Disinilah pentingnya melakukan literasi kepada masyarakat agar benar-benar paham tentang manfaat dan risiko tinggi bertransaksi di PBK.

Literasi PBK secara virtual yang terus dilakukan makin menarik masyarakat. Ini terlihat dari makin meningkatnya jumlah peserta yang mengikuti pemaparan tentang PBK. Jika dilihat pesertanya, yang pada awal literasi masih sekitar 200 orang, kemudian naik menjadi 400 orang bahkan terakhir sampai 700 orang terlibat dalam diskusi menarik mengenai PBK. Maklum, tawaran untuk melakukan transaksi di bidang perdagangan berjangka juga gencar dilakukan oleh para pialang perdagangan berjangka. Tak heran jika banyak masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh bisnis di bidang ini. Dan bagi Bappebti, kesempatan ini merupakan saat yang baik untuk menyosialisasikan PBK, terutama dari sisi risiko yang bisa dialami oleh masyarakat yang bertransaksi.

“Kami menginginkan industri PBK sebagai industri yang terpercaya di masyarakat. Masyarakat percaya bahwa transaksi di PBK itu aman dan dilindungi secara hukum. Masyarakat juga memperoleh informasi yang lengkap atas transaksi yang mereka laksanakan,” tambah Kepala Bappebti tentang literasi yang dilaksanakan.



Foto: Bagian KIP

Literasi SRG

Literasi tentang Sistem Resi Gudang (SRG) sangat diperlukan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat, terutama para petani dan nelayan yang kerap kali menghadapi masalah harga yang jatuh saat musim panen dan ketiadaan modal kerja untuk bercocok tanam atau melaut kembali.

Melalui literasi yang diselenggarakan, diharapkan para petani dan nelayan mampu mengambil keputusan yang tepat, yakni menyimpan komoditi hasil panennya di gudang SRG dan memanfaatkan fasilitas pinjaman dari bank yang bunganya jauh lebih rendah (sekitar 6 persen/tahun) dibandingkan dengan pinjaman dari tengkulak, misalnya.

Bappebti juga menginginkan SRG memberikan nilai tambah bagi para pemilik barang atau petani, sehingga dengan SRG memungkinkan petani menjual komoditinya dengan harga yang lebih tinggi. Bila biasanya petani menjual komoditinya kepada para tengkulak atau pengijon, dengan adanya SRG yang memberikan manfaat lebih bagus maka petani akan beralih ke SRG. Selain itu petani dapat memperoleh pendanaan dari bank dengan tingkat bunga yang lebih rendah dengan jaminan komoditi yang disimpan di gudang SRG.

Pemahaman tentang SRG ini terus gencar dilakukan oleh Bappebti melalui kegiatan literasi. Melalui literasi virtual ini Bappebti juga mendapat masukan untuk mengatasi kendala ataupun hambatan dalam pelaksanaan SRG. Literasi virtual ini juga sangat dirasakan manfaatnya oleh para pengelola gudang SRG, juga para petani dan nelayan, karena mereka tidak perlu repot-repot untuk memperoleh informasi yang akurat dari pihak yang berkompeten, yakni Bappebti.

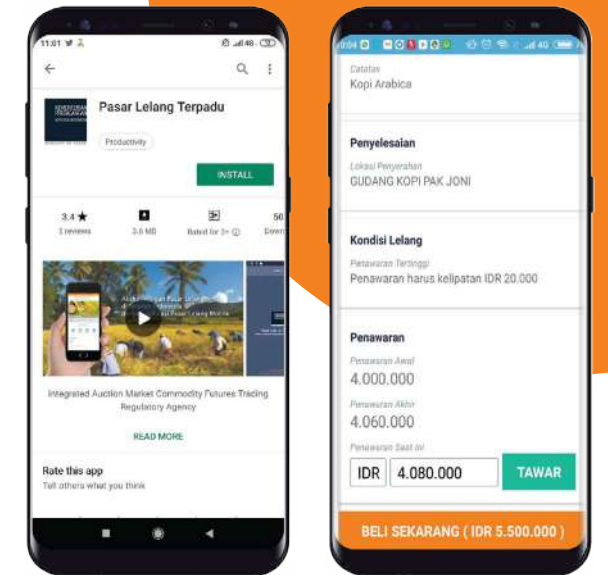
Literasi PLK

Literasi mengenai Pasar Lelang Komoditi (PLK) sangat penting dilakukan mengingat fungsi pasar lelang sebagai *price discovery* atau penentu harga. Melalui pasar lelang, produsen (petani/nelayan) bisa bertemu dan menentukan kesepakatan harga berdasarkan kekuatan tawar menawar saat itu.

Pasar lelang juga dapat memperpendek jalur distribusi komoditi. Misalnya, jika dengan jalur biasa harus melalui 5 atau 6 perantara, maka melalui mekanisme pasar lelang jalur distribusinya bisa dipangkas 3 hingga 4 jalur saja. Dengan makin pendeknya jalur distribusi maka para produsen atau petani dapat menjual komoditasnya dengan harga yang lebih tinggi. Sebaliknya dari perspektif si pembeli mereka dapat membeli dengan harga yang cukup bagus. Dengan begitu bagi pembeli dan penjual akan lebih menarik untuk bertransaksi di PLK dan meningkatkan nilai transaksi di PLK.

Literasi mengenai Pasar Lelang Komoditi (PLK) menyasar para penyelenggara pasar lelang dan juga *potential buyer* komoditi. Selain itu masyarakat umum terutama mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi banyak yang tertarik mengikuti literasi pasar lelang ini. Bappebti juga gencar menyosialisasikan sistem pasar lelang terpadu dimana proses lelang dilakukan secara *online*, sehingga bisa menjangkau peserta lelang yang lebih luas dari berbagai daerah.

PBK, SRG dan PLK adalah tema utama dalam literasi yang diselenggarakan oleh Bappebti, mengingat 3 bidang tersebut terkait langsung dengan masyarakat dan para pelaku bisnis dan perdagangan. Literasi virtual yang dilakukan oleh Bappebti menjadi pilihan saat ini karena aplikasi tersebut yang lebih populer digunakan



oleh banyak orang. Kepala Bagian Kerjasama dan Informasi Publik (KIP) Bappebti, Sentot Kamaruddin, menyatakan ke depan Bappebti akan terus gencar menyelenggarakan literasi virtual dengan tema bahasan yang lebih mendalam, khususnya tentang PBK, SRG dan PLK, termasuk tentang tugas, kewenangan dan fungsi Bappebti yang perlu diketahui oleh masyarakat.

Diharapkan melalui literasi ini masyarakat menjadi lebih *well-informed* dan mendorong tumbuhnya perdagangan berjangka dan ekonomi pada umumnya. *"Kepada masyarakat luas, para pelaku PBK, SRG dan PLK, serta mahasiswa dan akademisi yang terus mengikuti kegiatan Bappebti yang dilakukan secara online, Bappebti mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tak hingga. Inilah salah satu hikmah dari pandemi Covid-19 yang kita alami, dan kami berharap literasi dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bappebti memberikan manfaat kepada semua pihak,"* demikian Sentot Kamaruddin menambahkan.

Bentuk Harga Komoditi Lewat Pasar Lelang Koperasi Wira Agri Aneka Jaya-Jawa Tengah



Sejak tahun 2020 Koperasi Wira Agri Aneka Jaya (Waanekaya) - Jawa Tengah menyelenggarakan pasar lelang produk-produk agro di Jawa Tengah. Langkah ini dilakukan setelah keluarnya rekomendasi dari Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah serta izin dari Bappebti tahun 2019 lalu. Dengan adanya izin tersebut Koperasi Waanekaya bisa melaksanakan pasar lelang komoditi (PLK).

Sejak didirikan tahun 2017 Koperasi Waanekaya memang dimaksudkan untuk mengelola hasil agro dengan menyelenggarakan pasar lelang. Ketua Koperasi Waanekaya, Sigit Khomaidi, mengungkapkan ada 19 jenis komoditi yang bisa dilelang melalui pasar lelang di daerahnya. Kemudian melalui diskusi yang cukup panjang koperasi mulai melakukan lelang untuk komoditi beras, jagung, kopi. *"Berdasarkan survey yang kami lakukan sendiri secara independen, tidak menutup kemungkinan komoditi lain seperti minyak goreng juga dijual melalui pasar lelang,"* ujar Sigit. Untuk itu koperasi akan menyelenggarakan lelang setiap bulannya. Untuk diketahui Koperasi Waanekaya merupakan salah satu penyelenggara Pasar Lelang yang telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti melalui Keputusan Kepala Bappebti Nomor 33/BAPPEBTI/KEP-PL/SP/09/2019 tanggal 4 September 2019.

Bulan Februari 2021 merupakan kali ketiga pasar lelang diselenggarakan oleh Koperasi Waanekaya. Sebelumnya, penyelenggaraan lelang pertama dilaksanakan pada Juni 2020 lalu. Saat itu lelang

dihadiri oleh Bappebti yang diwakili oleh Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditi beserta Tim, serta perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Dalam penyelenggaraan tersebut komoditi yang dilelang adalah beras dan dilaksanakan secara online menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu (SPLT). Metode lelang dilakukan secara *online*, mengingat kondisi yang masih dalam status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat Pandemi Covid-19. Pada lelang pertama ini ada 4 paket beras yang dijual dengan volume masing-masing sebanyak 1.000 ton.

Pihak Koperasi Waanekaya berharap agar penyelenggaraan lelang ini dapat membuka jalan sekaligus menginformasikan mengenai keberadaan Pasar Lelang Komoditi kepada para pelaku usaha. Pada tahap selanjutnya, Koperasi Waanekaya akan tetap melakukan penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditi untuk komoditas beras, jagung, dan kopi menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu yang dilakukan setiap bulannya. Selain itu koperasi juga akan melelang komoditi jenis lainnya seperti kopi dimana di Jawa Tengah sentra produksi kopi terdapat di sepanjang pinggir gunung di Tegal, Kendal, Semarang, Kudus dan juga Jepara.

Sesudah melakukan sosialisasi yang dianggap cukup melalui lelang tahap pertama dan kedua, maka pada tahap ketiga Koperasi Waanekaya menyatakan lelang yang sudah berorientasi bisnis. *"Kami berharap*

nantinya sudah ada kerjasama dengan para pengelola gudang SRG. Dengan adanya kerjasama dengan pengelola gudang SRG pihak Koperasi tidak ragu lagi dengan kualitas komoditi yang dilelang. Sebab, jika sudah masuk ke SRG artinya mutu komoditi, seperti kandungan air pada beras 14 persen, tingkat kotor dan sebagainya sudah memenuhi standar yang ditentukan," ujar Sigit.

Sigit berharap pasar lelang komoditi yang diselenggarakan melalui Koperasi Wira Agri Aneka Jaya (Waanekaya) bisa mencapai tujuan pasar lelang dalam rangka pembentukan harga (*price discovery*) sebagaimana dicita-citakan oleh pemerintah, khususnya Bappebti Kementerian Perdagangan. *"Target kami adalah sebagai price discovery, bukan sebagai price order. Di koperasi terjadi pembentukan harga, bukan harga yang sudah ditentukan oleh pembeli,"* tambah Sigit. Namun untuk mencapai tujuan tersebut pihaknya harus menghadapi tantangan yang tidak kecil, karena setiap komoditi yang ada sebenarnya sudah memiliki jalurnya pemasarannya sendiri-sendiri. Dan hal itu sudah berlangsung lama. Maka Sigit mengaku tidak terkejut jika pasar lelang yang digelarnya masih belum banyak peminatnya.

Namun Sigit berkeyakinan besar jika pasar lelang komoditi yang sudah dimulai di koperasinya akan mendapat tempat di hati petani dan para pedagang, sebab melalui pasar lelang petani akan memperoleh harga jual yang lebih baik, sementara bagi pedagang akan mendapat komoditi dagangan dengan harga yang lebih murah.

Untuk mengikuti pasar lelang produk pertanian ini, simak terus perkembangannya melalui website bappebti.go.id. Adapun registrasi dan pendaftaran dapat di akses melalui <http://plk.bappebti.go.id>, dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Penyelenggara 0813-9347-0001 (Kak Laily). Siapkan KTP, nomor telpon dan alamat email sebagai persyaratannya.



Ayo Ikut Seleksi Calon Arbiter BAKTI



Sebuah tampilan iklan *pop up* muncul di awal website **bappepti.go.id** sejak Februari 2021 lalu. Isinya pengumuman tentang dibukanya lowongan posisi menjadi Arbiter BAKTI. Masyarakat umum, para praktisi hukum maupun para pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) boleh mengajukan diri untuk menjadi Arbiter BAKTI ini, tentunya dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BAKTI adalah lembaga Arbitrase di bidang perdagangan berjangka. Arbitrase sendiri merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum antara para pihak yang bersengketa yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase. Dalam Arbitrase, para pihak memberikan kewenangan kepada Arbiter (Majelis Arbitrase) untuk memberikan putusan atas sengketa pada tingkat pertama dan terakhir.

BAKTI mengkhususkan diri pada sengketa perdata yang berkenaan dengan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan/ atau transaksi-transaksi lain yang diatur Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa BAKTI adalah pengadilan swasta khusus untuk bidang komoditi.

Sengketa di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang maupun transaksi lainnya di bawah pengawasan yang dilakukan oleh Bappebti sangat mungkin terjadi. Untuk itu nasabah bisa juga memilih penyelesaiannya secara langsung dengan cara berdamai antara pihak yang bersengketa. Ini merupakan cara yang

paling cepat, tapi bisa jadi sulit dicapai kesepakatan karena masing-masing pihak merasa diri lebih benar. Cara lainnya adalah melalui jalur hukum pengadilan, namun jalan melalui pengadilan ini biasanya memakan waktu lebih lama dan biaya yang lebih besar. Dan cara yang lebih cepat, lebih efisien adalah melalui arbitrase BAKTI dimana hadir pihak ketiga yakni Arbiter yang menjadi mediator untuk mencari solusi yang terbaik atas sengketa yang terjadi.

Kehadiran BAKTI untuk menunjang industri perdagangan berjangka dan berfungsi sebagai lembaga Arbitrase khusus di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dengan menyediakan layanan yang terpercaya, efisien dan berstandar internasional sehingga menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa di luar peradilan umum yang putusannya bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat para pihak. Komitmen penyelesaian masalah melalui arbitrase BAKTI ini diharapkan dapat menumbuhkan keyakinan dunia usaha dan investor untuk memanfaatkan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai sarana lindung nilai (*hedging*) dan investasi.

Nah, dalam rangka mencari calon-calon Arbiter tersebut, maka dibuka kesempatan untuk menjadi arbiter BAKTI dengan memasukkan lamaran sampai tanggal 22 Maret 2021. Para peminat bisa menyampaikan lamarannya melalui sekretariat@bakti-arb.org. Persyaratan yang ditentukan mengacu pada persyaratan umum badan arbitrase, antara lain cakap melakukan tindakan hukum, berusia minimal 35 tahun; bukan polisi, jaksa, hakim, panitera dan pejabat peradilan lainnya



Untuk informasi tambahan, pelaksanaan kegiatan sehari-hari BAKTI dilakukan oleh Pengurus BAKTI yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Anggota untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Kepengurusan yang sekarang berlangsung adalah periode 2020-2023, dan terdiri dari:



Kadjatni
Ketua



Achmad Djauhari
Wakil Ketua



Endang Sutisna
Sekretaris Jendral



Dijah Pratiwi Prihandini
Bendahara

Informasi lebih lanjut bisa Anda akses melalui:
<http://www.bakti-arb.org/pengurus>

Kerjasama Bappebti-Aprindo Optimalkan PBK-SRG-PLK

Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan Perdagangan Berjangka Komoditas (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditi (PLK) untuk mempersingkat rantai perdagangan. Salah satunya dengan melakukan kerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) di kantor Bappebti, Jakarta, Jumat (26/2). Kepala Bappebti Sidharta Utama dan Ketua Aprindo Roy N Mandey menandatangani perjanjian disaksikan oleh Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dan Sekjen Aprindo Solihin.

Dalam sambutannya Wamendag menyampaikan di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, para pelaku usaha di dunia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan komoditi atau produk yang dibutuhkan. PBK, SRG, dan PLK diharapkan dapat mempersingkat mata rantai perdagangan dan mendorong pelaku usaha agar lebih profesional dalam berproduksi.

Lebih lanjut Wamendag menyampaikan pengembangan PBK, SRG, dan PLK akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan sektor industri dan perdagangan yang berbasis sumber daya lokal. Selain itu, juga akan memberikan efek positif kepada produsen komoditas seperti petani, peternak, nelayan, dan masyarakat lainnya.

Foto: Bagian KIP



Kepala Bappebti Sidharta Utama menambahkan, penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilandasi semangat gotong royong. Aprindo dengan jumlah anggota dan jaringan ritelnya yang luas di seluruh Indonesia dapat membantu para petani komoditi pangan, perkebunan, atau kelautan. Salah satunya, dengan mengambil produk komoditi dari SRG atau PLK.

Hadir dalam acara ini Staf Ahli Mendag Bidang Pengamanan Pasar, Sutriono Edi, Pejabat Eselon II Bappebti, Perwakilan dari Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, serta Anggota Aprindo.



• Peningkatan Kompetensi Calon Pengelola Gudang SRG Jateng

Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG & PLK, Widiastuti menyampaikan penjelasan terkait kebijakan Sistem Resi Gudang (SRG) dalam kegiatan Peningkatan Kompetensi Calon Pengelola Gudang SRG di wilayah Jawa Tengah, di Semarang. Selasa (23/2). Kegiatan diikuti 40 peserta pelaku usaha yang nantinya disiapkan menjadi pengelola gudang SRG.



Foto: Bagian KIP



Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Perindag Provinsi Jateng sebagai salah satu upaya mendukung kebijakan Kementerian Perdagangan dalam mengembangkan implementasi SRG di Indonesia. Diharapkan pelaksanaan SRG di Jawa Tengah semakin meluas dan pemanfaatan SRG sebagai salah satu instrumen perdagangan, pembiayaan dan pemberdayaan pelaku usaha pertanian akan semakin meningkat.

Program Magang Calon Pengelola Gudang SRG

Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK, Widiastuti, membuka program magang dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah bekerja sama dengan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang di Subang, Selasa (16/2).

Program magang ini diselenggarakan dalam rangka membekali pengetahuan dan teknis kepada para peserta yang akan menjadi Calon Pengelola Gudang SRG di Subang, di antaranya PT Thara Jaya Niaga. Selanjutnya para peserta menjalani magang di gudang SRG Produsen Gunung Luhur Berkah selama 30 hari.



Foto: Bagian KIP



Foto: Bagian KIP

• Bappebti Sosialisasi Peraturan Aset Kripto

Kepala Bappebti Sidharta Utama memberikan pengarahannya sekaligus membuka kegiatan literasi perdagangan berjangka komoditi melalui daring dengan tema "Mengenal Perdagangan Fisik Aset Kripto di Indonesia", Kamis (18/02). Literasi diikuti lebih dari 700 orang peserta dari seluruh Indonesia. Tema tentang Aset Kripto saat ini memang menarik dan menjadi perhatian masyarakat, karena saat ini sedang terjadi tren kenaikan harga Kripto yang tergolong luar biasa.

Dalam arahannya Kepala Bappebti menyampaikan bahwa Bappebti telah menerbitkan peraturan terkait aset kripto, sehingga diharapkan dapat menambah kepercayaan dan integritas serta kepastian para pelaku usaha PBK dalam melakukan transaksi, khususnya aset kripto. Bappebti juga telah melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan calon Pedagang Aset Kripto bagi 13 Exchanger yang sudah terdaftar di Bappebti. Selain itu, Bappebti akan menyiapkan instrumen pengawasan yang lebih komprehensif, mengingat perdagangan aset kripto termasuk kegiatan bisnis yang sangat kompleks.

Lebih luas pembahasan dan diskusi mengenai Aset Kripto ini dijelaskan oleh Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Sahudi, Kepala Biro Peraturan Perundangan-Undangan dan Penindakan M Syist, Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Mardiana Listyowati, dengan moderator Sekretaris Bappebti Nusa Eka.



Foto: Bagian KIP

Kunker Komisi VI Bidang Perdagangan Bahas UMKM Bali

Kementerian Perdagangan yang diwakili Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Pengamanan Pasar, Sutiriono Edi mendampingi Kunjungan Kerja Reses Anggota Komisi VI DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi VI DPR RI, Faisol Riza ke Provinsi Bali, Selasa (16 Feb). Dalam kunjungan kerja ini, Anggota Komisi VI DPR juga melakukan pertemuan dengan jajaran Kementerian BUMN, Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), serta Direksi PT BRI (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Pertamina (Persero).

Dalam kunjungan ini dibahas tentang jumlah data dan kapasitas agen SPBE/SPBU, kebutuhan BBM dan gas di Provinsi Bali, serta kontribusi sektor perbankan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Bali di masa pandemi.

Pada kesempatan ini Sutiriono Edi menjelaskan upaya yang dilakukan Kemendag dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga pangan di masa pandemi. Ditegaskan, Kemendag memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dari produksi dalam negeri sebagai tulang punggung pasokan nasional.



Bappebti Umumkan Daftar Aset Kripto

Transaksi digital semakin hari semakin menarik masyarakat, termasuk di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Untuk itu Bappebti terus melakukan pemantauan dan mengeluarkan kebijakan yang sifatnya memberi perlindungan kepada masyarakat dan juga mendorong perkembangan di kalangan industri perdagangan berjangka. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas industri perdagangan berjangka komoditi (PBK) dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, terutama dalam menghadapi persaingan global dalam era ekonomi digital. Hal ini disampaikan Kepala Bappebti Sidharta Utama dalam kegiatan literasi perdagangan berjangka komoditi melalui daring dengan tema “Mengenal Perdagangan Fisik Aset Kripto di Indonesia” yang digelar Kamis (18/2).

Kepala Bappebti memberi gambaran tentang perdagangan pasar fisik aset kripto terus meningkat dan segmentasi pasarnya juga semakin luas. Hal tersebut ditandai dengan naiknya harga aset kripto yang diperdagangkan oleh calon pedagang, salah satunya yaitu *bitcoin*. Sejak awal 2020, harga *bitcoin* telah menguat/ meningkat sekitar 570 persen. Harga satu bitcoin pada awal 2020 tercatat sebesar USD8.440 kemudian pada akhir 2020 meningkat menjadi USD29.000, dan pada pertengahan Februari 2021 harganya naik menjadi USD48.149. *“Hal ini mengindikasikan bahwa perdagangan fisik aset kripto, khususnya bitcoin sangat diminati masyarakat,”* ujar Sidharta.

Regulasi ini juga bertujuan mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pengembangan senjata pemusnah massal. Hal itu sesuai rekomendasi standar internasional *Financial Action Task Force (FATF)* untuk melindungi pelanggan serta memfasilitasi inovasi dan pertumbuhan aset kripto di Indonesia.

Kepala Bappebti menjelaskan, melalui regulasi ini Bappebti telah menetapkan 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Dengan demikian, untuk produk yang tidak masuk dalam daftar tersebut wajib dilakukan *delisting*. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi nasabah dan menciptakan perdagangan aset kripto yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat.

Pada bagian lain Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Sahudi, menegaskan bahwa aset kripto dilarang digunakan sebagai alat pembayaran dan hanya boleh digunakan sebagai investasi komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Sementara Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, M. Syist, mengimbau masyarakat agar masyarakat memahami mekanisme dan risiko sebelum memutuskan bertransaksi aset kripto.

Hingga awal tahun 2021, terdapat 13 perusahaan yang sudah memperoleh tanda daftar dari Bappebti sebagai calon pedagang fisik aset kripto. Perusahaan tersebut adalah PT Cripto Indonesia Berkat, Upbit Exchange Indonesia, PT Tiga Inti Utama, PT Indodax Nasional Indonesia, PT Pintu Kemana Saja, PT Zipmex Exchange Indonesia, PT Bursa Cripto Prima, PT Luno Indonesia Ltd, PT Rekeningku Dotcom Indonesia, PT Indonesia Digital Exchange, PT Cipta Coin Digital, PT Trinita Investama Berkat, dan PT Plutonext Digital Aset.



Bappebti Tidak Tanggung Opsi Biner Ilegal

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, M. Syist mengungkapkan selain pelanggaran yang dilakukan domain situs pialang berjangka luar negeri, juga terdapat domain situs dari entitas yang melakukan kegiatan melakukan opsi biner (*binary option*).

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Opsi merupakan kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual kontrak berjangka atau komoditi tertentu, pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu, yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi. Opsi dalam konteks yang ditawarkan oleh broker kepada *trader/ investor* melalui opsi biner hanyalah sebatas memilih prediksi harga naik atau harga turun.

Hal ini didasarkan pada periode waktu tertentu untuk mendapatkan profit atau sebaliknya *trader/investor* mengalami kerugian. Sehingga mekanisme yang

dilakukan melalui opsi biner tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK. *“Mengingat opsi biner yang beredar di tengah masyarakat saat ini tidak memiliki legalitas dari regulator di Indonesia, maka apabila terjadi perselisihan (dispute) antara nasabah dengan penyedia aplikasi opsi biner, Bappebti selaku regulator di bidang perdagangan berjangka tidak dapat memfasilitasi nasabah saat mediasi,”* tegas M Syist.

Selain itu, penyedia aplikasi opsi biner tersebut tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Jadi, apabila masyarakat merasa dirugikan, tidak ada pihak yang dapat diminta untuk bertanggung jawab. Keberadaannya di luar negeri juga belum tentu dapat dipastikan legalitasnya dan memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam penyelesaian perselisihan antara nasabah dengan penyedia aplikasi opsi biner.

Untuk itu, sekali lagi M. Syist mengingatkan masyarakat yang ingin berinvestasi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, diharapkan agar selalu mempelajari tentang latar belakang perusahaan, tata cara transaksi dan penyelesaian perselisihan, dan kontrak berjangka komoditi yang ditawarkan. *“Jangan mudah tergiur keuntungan yang besar dalam waktu singkat dan diluar batas kewajaran. Pastikan sebelum memutuskan untuk berinvestasi, ketahui terlebih dahulu profil dan legalitas perusahaan, dengan cara mengakses situs web: <https://www.bappebti.go.id>,”* kata M Syist.



Bappebti Batalkan Persetujuan PT Bahtera Komoditi Indonesia

Tanggal 11 Februari 2021 Bappebti mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembatalan persetujuan sebagai penyelenggara pasar lelang dengan penyerahan kemudian (*forward*) atas nama PT Bahtera Komoditi Indonesia. SK Kepala Bappebti nomor 02 Tahun 2021 tersebut dikeluarkan karena berdasarkan hasil pengawasan Bappebti, PT Bahtera Komoditi Indonesia sudah tidak beralamat di Linq @Central Kemayoran Nomor D-578, Jakarta dan tidak diketahui keberadaannya.

Selain itu PT Bahtera Komoditi Indonesia juga tidak pernah menyelenggarakan Pasar Lelang Komoditi sejak perusahaan tersebut memperoleh persetujuan dari Bappebti Kementerian Perdagangan. Sementara pengurusnya tidak dapat dihubungi, baik melalui media elektronik maupun media sosial.

Keputusan pembatalan persetujuan ini tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab perusahaan tersebut terhadap tuntutan atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain sebelum pembatalan persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditi ditetapkan.

Tetap Waspada Dengan Robot Trading

Kementerian Perdagangan (Kemendag) hingga saat ini belum pernah mengeluarkan perizinan berinvestasi menggunakan perangkat lunak *trading forex* atau robot trading. Penegasan dikeluarkan Kemendag melihat maraknya penawaran perangkat lunak trading forex atau robot trading kepada masyarakat belakangan ini.

Penawaran robot trading dilakukan lewat iklan-iklan di berbagai media nasional. Perangkat lunak tersebut diklaim dapat memberikan keuntungan secara maksimal dan meminimalisasi risiko dari trading forex. Dalam iklannya dikatakan aplikasi atau perangkat lunak *trading forex* dapat menganalisis data transaksi forex beberapa tahun sebelumnya serta dapat melakukan investasi secara otomatis (*auto pilot*). Perangkat lunak tersebut juga dianggap bisa memberikan keuntungan yang besar tanpa mengganggu kegiatan sehari-hari calon investornya. *"Padahal, penggunaan perangkat lunak trading forex juga memiliki risiko kerugian,"* sebagaimana dipublikasi akun IG Kemendag, Selasa (2/2).

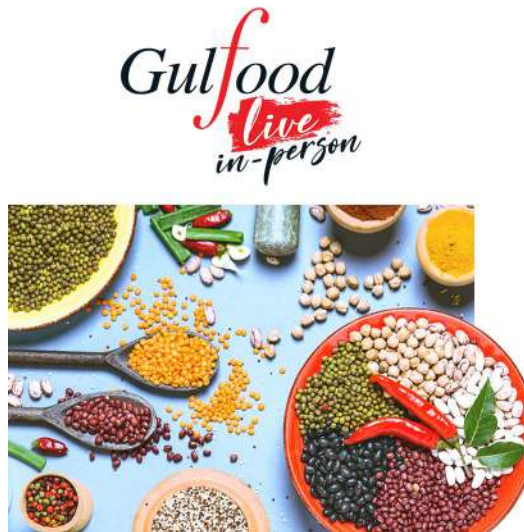
Untuk itu kepada para calon investor atau masyarakat yang ingin melakukan transaksi forex Kemendag menyarankan cermati dahulu kepada para investor agar sebelum berinvestasi untuk mengetahui terlebih dahulu profil dan legalitas perusahaan dengan cara

mengakses situs PialangBerjangka. Di sana akan tertera nama-nama pialang yang terdaftar di Bappebti.



Ekspor Januari 2021 Tertinggi Sejak 2014

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, neraca perdagangan pada Januari 2021 kembali mengalami surplus yang cukup tinggi sebesar USD1,96 miliar. Ini merupakan surplus Januari tertinggi sejak Januari 2014. Surplus perdagangan Januari 2021 disumbang oleh surplus neraca nonmigas sebesar USD2,6 miliar dan defisit neraca migas sebesar USD668,1 juta. *"Kita mengawali tahun 2021 dengan cukup baik. Kinerja neraca perdagangan luar negeri Indonesia masih terus melanjutkan tren surplus bulanan yang terjadi sejak bulan Mei 2020. Pada Januari 2021, neraca perdagangan kembali tercatat mengalami surplus sebesar USD 1,96 miliar,"* ujar Mendag.



Menteri menjelaskan komoditi penyumbang surplus pada Januari 2021 antara lain lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15), bahan bakar mineral (HS 27), dan alas kaki (HS 64). Sementara negara mitra dagang utama Indonesia penyumbang surplus nonmigas terbesar adalah Amerika Serikat (AS), India, Filipina, Jepang, dan Malaysia.

Mendag menjelaskan, ekspor nonmigas Januari 2021 meningkat sebesar 12,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (YoY). Bahkan, nilai ekspor nonmigas Januari 2021 lebih tinggi dibandingkan ekspor nonmigas periode yang sama selama lima tahun terakhir. Mendag menambahkan kinerja ekspor Januari 2021 yang baik terutama disebabkan adanya peningkatan harga komoditi internasional.

Indeks harga komoditi energi pada Januari 2021 meningkat sebesar 10,0 persen (MoM). Selain itu, indeks harga nonenergi tumbuh sebesar 4,4 persen (MoM) dan indeks harga logam mulai tumbuh sebesar 1,1 persen (MoM). Sejumlah produk ekspor yang mengalami peningkatan harga internasional adalah komoditas perkebunan, seperti minyak kernel sawit, teh, kopra, dan karet. Selain itu, komoditas pertambangan, seperti batubara, bijih besi, tembaga, timah, dan nikel.

Indonesia Hadirkan 15 Perusahaan di Gulfood 2021 Dubai

Upaya penetrasi produk makanan dan minuman (mamin) Indonesia ke pasar nontradisional seperti kawasan Teluk dan Timur Tengah terus digalakkan Kementerian Perdagangan. Salah satunya, dengan keikutsertaan Indonesia pada pameran Gulfood 2021 di Dubai World Trade Centre, Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) pada 21-25 Februari 2021. Gelaran ini merupakan salah satu ajang promosi produk (mamin) Indonesia dengan memanfaatkan kemeriahan rencana Expo 2020 Dubai.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN), Kasan, mengatakan pasar mamin Indonesia di kawasan Teluk dan Timur Tengah berpotensi terus meningkat. Hal ini terlihat pada peningkatan nilai ekspor makanan olahan Indonesia ke UEA pada 2020. *"Uni Emirat Arab adalah hub bagi Kawasan Teluk dan Timur Tengah. Sebagai pasar potensial, nilai ekspor makanan olahan Indonesia ke UEA pada 2020 tercatat sebesar USD89,42 juta, atau meningkat 27,09 persen dibandingkan tahun sebelumnya,"* kata Kasan di Dubai, Senin (21/2).

Gulfood merupakan pameran tahunan bergengsi dan bertaraf internasional terbesar di UEA. Pada 2020, pameran ini diikuti lima ribu peserta dari 120 negara dan dikunjungi 92.902 pengunjung/*buyer* dari 186 negara. Sekitar 59 persen pengunjung berasal dari Amerika dan Asia, sementara sisanya adalah pengunjung lokal. Indonesia sendiri mengikutsertakan 15 perusahaan pada acara pameran ini.



Indonesia Siap Hadapi Gugatan Uni Eropa Dalam Sengketa DS-592

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan Pemerintah Indonesia siap memperjuangkan dan melakukan upaya pembelaan terhadap gugatan Uni Eropa (UE) atas sengketa DS 592 – *Measures Relating to Raw Materials*. Penegasan disampaikan menanggapi langkah UE yang secara resmi untuk kedua kalinya meminta pembentukan panel sengketa DS 592 – *Measures Relating to Raw Materials* pada pertemuan reguler Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body* – WTO) pada 22 Februari 2021.

"Pemerintah Indonesia telah siap untuk memperjuangkan dan melakukan upaya pembelaan terhadap gugatan UE. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan berkeyakinan, kebijakan dan langkah yang ditempuh Indonesia saat ini telah konsisten dengan prinsip dan aturan Badan Perdagangan Dunia (WTO)," tegas Menteri Perdagangan.

Mendag juga menekankan, meskipun menyisahkan tindakan dan langkah UE, proses sengketa di WTO merupakan suatu hal yang biasa dan wajar terjadi manakala terjadi persoalan di antara anggota WTO. *"Tindakan dan langkah yang dilakukan UE tentunya dapat menghalangi proses pembangunan*

dan kemajuan Indonesia di masa yang akan datang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, tindakan ini merupakan hal yang biasa dan wajar terjadi manakala terjadi persoalan di antara anggota WTO," ujar Mendag.

Menanggapi permasalahan di dalam ranah perdagangan internasional termasuk gugatan di WTO, Presiden Joko Widodo juga telah memberikan arahan untuk dihadapi secara maksimal sehingga tidak mengganggu agenda pembangunan nasional. Untuk itu, lanjut Mendag, Pemerintah akan terus mempertahankan kebijakan di sektor mineral dan batubara (minerba) guna mendukung transformasi Indonesia menjadi ekonomi maju dengan tetap mengutamakan tata kelola yang baik, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. *"Indonesia juga berkomitmen untuk terus menerapkan good mining practices serta memperjuangkan kepentingan Indonesia pada sengketa nikel. Hal ini sebagai wujud pelaksanaan amanat konstitusi dalam memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan bumi nusantara dengan cara yang baik dan berkesinambungan demi kemajuan Indonesia dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang,"* tambah Menteri Perdagangan.

Trade Performance Optimism in 2021

In January 2021, Indonesia's export performance reached USD 15.3 billion, an increase of 12 per cent compared to the same month in the previous year (YoY). "Indonesia's exports in early 2021 have shown a pretty good performance, even though it is still in the Covid-19 pandemic period," said the Trade Minister.

Minister of Trade Lutfi explained, non-oil and gas exports in January 2021 increased by 12.5 per cent compared to the same period the previous year (YoY). The value of non-oil and gas exports in January 2021 was higher than the non-oil and gas exports in the same period during the last five years.

Furthermore, the Trade Minister said, the good performance of exports in January 2021 was mainly due to an increase in international commodity prices. The energy commodity price index in January 2021 increased by 10.0 per cent (MoM).

Foto: Bagjan KIP



Also, the non-energy price index grew by 4.4 per cent (MoM) and the metal price index started to grow by 1.1 per cent (MoM). Several export products whose international prices have increased are plantation commodities, such as palm kernel oil, tea, copra and rubber. Also, mining commodities, such as coal, iron ore, copper, tin and nickel.

Indonesia's non-oil and gas exports to several main markets in January 2021 continued to increase, including non-oil and gas exports to Thailand which recorded an increase of 14.7 per cent (MoM) and Australia recorded an increase of 10.0 per cent (MoM).

The increase in exports to Thailand was due to the fourfold increase in exports of iron and steel products (HS 72) to USD 12.8 billion in January 2021 compared to December 2020 of USD 3.1 million.

Moreover, copper and related goods (HS 74) tripled to USD 28.3 million compared to December 2020 at USD 10.3 million.

January 2021 Record Highest Exports

Minister of Trade Muhammad Lutfi said the trade balance in January 2021 again experienced a quite high surplus of USD 1.96 billion. This is the highest January surplus since January 2014. The January 2021 trade surplus was contributed by a non-oil and gas balance surplus of USD 2.6 billion and an energy and gas deficit of USD 668.1 million.

"We have started on 2021 quite well. The performance of Indonesia's foreign trade balance continues the monthly surplus trend that has occurred since May 2020. In January 2021, the trade balance recorded a surplus of USD 1.96 billion," said Minister Luthfi.

The Trade Minister said commodities that contributed to the January 2021 surplus included animal/vegetable

Foto: Bagjan KIP



fats and oils (HS 15), mineral fuels (HS 27), and footwear (HS 64). Meanwhile, Indonesia's main trading partner countries that contributed the most to the non-oil and gas surplus in January 2021 were the United States (US), India, the Philippines, Japan, and Malaysia.

"Indonesia's trade balance surplus in January 2021 is better than January 2019 which experienced a deficit of USD 1.0 billion and January 2020 which experienced a deficit of USD 0.6 billion," he said.

The Ministry of Trade to Boost Exports of Coffee, Tea and Cocoa Products

The Ministry of Trade held a virtual business meeting with the theme "Post Brexit: Strategy to Increase Exports of Coffee, Tea and Cocoa Products to the UK", Thursday (18/2). This is an effort to increase the export of Indonesian coffee, tea and cocoa products to the UK after the Brexit. This activity is expected to further open up opportunities for Indonesian business actors to export these products to the UK.

"In the midst of the post-Brexit and Covid-19 pandemic conditions, it is hoped that Indonesian coffee, tea and cocoa business players will be able to take advantage of export opportunities to the UK. Given all three types of this product's consumption trend continues to show an increase during the pandemic," said Kasan.

Foto: Bagjan KIP



In addition to the opportunities that exist, according to Kasan, currently, there are also several challenges faced by Indonesian coffee, tea and cocoa business actors in exporting their products. "Apart from tariff barriers, several non-tariff barriers that also need to be considered include issues of sustainability, the environment, as well as storytelling or the philosophy of the products being marketed," explained Kasan.

Meanwhile, for coffee products, the demand for fair trade, sustainable, traceability and organic certification is often an obstacle. For tea, the obstacle is that the anthraquinone content of tea leaves exceeds the 0.02 mg per kilogram threshold. Then, the obstacle for Indonesian cocoa is that the C content of cadmium still exceeds the 0.5 ppm threshold. "The general challenges for the three products include the lack of innovation and strict requirements for food safety, food contaminants, as well as labelling and packaging," explained Kasan.

The Ministry of Trade Signs Cooperation Agreement with IREA

The Commodity Futures Trading Supervisory Agency (CoFTRA-Bappebti) of the Ministry of Trade continues to optimize the use of commodity futures trading (CFT), warehouse receipt systems (WRS), and commodity auction markets (CAM) to cut trade chains. One of them is by signing a cooperation agreement with the Indonesian Retail Entrepreneurs Association (IREA) at the CoFTRA office, Jakarta, Friday (26/2).

The signing of the cooperation agreement was carried out by the Head of CoFTRA Sidharta Utama and the Chairperson of IREA Roy N Mandey, witnessed by Deputy Minister of Trade Jerry Sambuaga, Expert Staff to the Minister of Trade for Market Security Sutriyono Edi, and Secretary-General IREA Solihin.

"In the current era of advances in information and communication technology, business actors in the world have equal opportunity to obtain the required commodity or product. It is hoped that the CFT, WRS and CAM can shorten the trade chain and encourage

Foto: Bagjan KIP



business actors to be more professional in producing," said Deputy Minister of Trade Jerry Sambuaga.

The Head of Bappebti Sidharta Utama added that the signing of this cooperation agreement was based on the spirit of cooperation. IREA with its number of members and an extensive retail network throughout Indonesia can help farmers in food, plantation, or marine commodities. One of them, by taking the commodity products from the Warehouse Receipt System or Commodity Auction.

Menatap 2021 Dengan Tetap Fokus PBK-SRG-PLK

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tahun 2021 ini akan memfokuskan target kinerjanya tahun ini pada tiga hal, yakni meningkatkan transaksi di Pasar Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditi (PLK).

Di PBK, Bappebti akan lebih fokus pada pertumbuhan bursa multilateral, lantaran selama ini agak ketinggalan dibandingkan yang lain. Untuk mendorongnya, Bappebti siapkan berbagai strategi termasuk menjadikan perdagangan multilateral lebih menarik bagi investor ke depan. Termasuk mengupayakan pelaku pasar untuk menjadikan perdagangan multilateral menjadi lebih mudah.

Bagaimana strategi Bappebti meningkatkan kinerjanya di tahun Kerbau ini? Ikuti perbincangan Tim **Buletin Bappebti** dengan Kepala Bappebti **Sidharta Utama**. Berikut petikannya:

Sidharta Utama
Kepala Bappebti



Buletin Bappebti: Selamat pagi, Bapak. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Memasuki tahun baru, tahun 2021, secara garis besar apa yang akan dilaksanakan oleh Bappebti pada setahun 2021 ini?

Sidharta Utama: Kalau kita mengacu pada sasaran strategis Kementerian Perdagangan salah satunya adalah tentang peran Bappebti. Jadi secara garis besar Bappebti akan mengambil peran untuk mengoptimalkan peranan pasar berjangka komoditi (PBK), sistem resi gudang (SRG) dan pasar lelang komoditas (PLK). Yang dimaksud optimal adalah nilai transaksi di PBK, SRG dan PLK naik secara signifikan. Sebab, PBK, SRG dan PLK ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar kepada masyarakat/investor. Kalau nilai transaksinya rendah tentu dampaknya kepada masyarakat juga sangat kecil.

Ini adalah target untuk tahun ini dan tahun mendatang yaitu mengupayakan peran maksimal dari PBK, SRG dan PLK dapat tercapai. Selain itu sasaran strategis Kemendag juga menyebutkan bahwa perlu ada tata kelola yang baik, dan untuk itu Bappebti mendorong para pelaku usaha di sektor PBK, SRG dan PLK juga menjalankan tata kelola yang baik, yakni dengan menaati semua aturan yang dikeluarkan Bappebti.

Buletin Bappebti: Tahun 2020 adalah tahun pandemi Covid-19. Namun pada saat banyak bisnis dalam bidang lain mengalami kontraksi, perdagangan berjangka (PBK) justru mengalami pertumbuhan positif. Faktor apa saja yang menyebabkan hal itu terjadi?

Sidharta Utama: Ada beberapa faktor yang menyebabkan nilai transaksi di PBK meningkat signifikan. Pertama, transaksi di PBK bisa dilakukan secara *online* dari kantor atau dari manapun, jadi tidak harus secara fisik investor datang ke bursa. Ini berdampak positif terhadap transaksi di PBK. Ada faktor lain juga yaitu pemasaran yang lebih gencar dilakukan oleh pelaku bursa berjangka komoditi kepada kaum milenial

Faktor lainnya adalah pada saat terjadi pandemi Covid pada tahun 2020, harga komoditi semakin fluktuatif. Misalnya saja, harga CPO fluktuasi naik turunnya cukup tajam selama pandemi Covid-19. Demikian juga kurs valuta asing dan harga emas juga berfluktuasi tajam.

Nah, bertransaksi di PBK ini kan justru makin menarik bila harganya semakin berfluktuasi yang kemudian menjadi faktor dominan pelaku usaha bertransaksi di PBK. Ini menjadi faktor pendorong meningkatnya transaksi perdagangan berjangka.

Faktor berikutnya adalah karena adanya berbagai produk baru yang diluncurkan di bursa berjangka maupun di Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). Ini juga akan berdampak positif terhadap kenaikan transaksi. Jadi tadi ada 3 faktor yang menyebabkan tingginya kenaikan transaksi di PBK pada tahun 2020.

Buletin Bappebti: Bagaimana Bappebti melihat prospek PBK tahun 2021 dan apa langkah-langkah yang akan ditempuh Bappebti untuk mengantisipasinya?

Sidharta Utama: Tahun lalu Bappebti telah melakukan kajian untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan pasar multilateral itu relatif tidak berkembang dibanding dengan SPA. Pada dasarnya para pialang, investor memandang bahwa bertransaksi di multilateral kurang menguntungkan, selain karena pasarnya tidak likuid, transaksinya rendah juga saat pembentukan harga kadang terjadi anomali. Seharusnya dalam pasar multilateral harga sudah terbentuk berdasarkan harga dari *underwrite asset* tetapi kadang mengalami satu anomali.

Maka Bappebti telah berencana untuk meningkatkan nilai transaksi multilateral. Pertama, dengan memperluas cakupan produk yang diperdagangkan. Saat ini BI telah merencanakan untuk memperdalam pasar keuangannya, antara lain untuk pasar valas. BI berencana mengembangkan kontrak berjangka untuk valuta asing yakni IDR dan USD. Jika ini bisa diperdagangkan di bursa berjangka, maka akan berdampak sangat signifikan terhadap kenaikan

nilai transaksi di multilateral. Sebab, kebutuhan untuk melakukan *hedging* terhadap valuta asing ini sangat tinggi. tentunya kami juga mendorong untuk kontrak-kontrak berjangka lainnya.

Kedua, adalah meningkatkan insentif bagi pelaku pasar untuk melakukan transaksi multilateral. Jadi kami memberikan dorongan dengan berbagai cara. Misalnya, mempermudah perizinan atau pun syarat bagi pialang multilateral. Juga dengan mempercepat izin registrasi *online*. Calon investor tidak harus hadir secara fisik tetapi bisa melakukan transaksi secara *online*.

Selanjutnya, ada rencana untuk menerapkan pajak final untuk transaksi multilateral bisa lebih rendah dibandingkan dengan SPA. Biasa kalau ada transaksi di PBK kalau investor ada keuntungan yang diperoleh tentu akan *subject to* pajak-pajak yang berlaku seperti pajak penghasilan. Kalau rugi dikompensasi dengan mengurangi pajaknya. Hanya saja saat ini belum ada pajak final yang diterapkan secara persentase sehingga bisa langsung diterapkan.

Maka Bappebti mengupayakan diterapkan pajak *final* yang langsung dipotong dari nilai transaksi dan langsung disetor ke kas negara. jadi secara administrasi juga lebih mudah dan berpotensi meningkatkan pendapatan pajak.

Strategi ketiga dengan mempermudah investor bertransaksi di multilateral. Karena kami mengidentifikasi sejumlah masalah operasional di perdagangan multilateral. Misalnya, proses pembukaan rekening di multilateral yang relatif kompleks, sehingga perlu lebih disederhanakan.

Jadi banyak hal yang kompleks di perdagangan multilateral, sehingga membenahinya tidak cukup waktu satu tahun. Pembenahan harus terus menerus dilakukan selama beberapa tahun ke depan.

Buletin Bappebti: *Dalam hal Sistem Resi Gudang (SRG) tahun 2020 Bappebti berhasil merealisasikan SRG Ayam Karkas Beku (di Bekasi dan Cianjur). Demikian juga dengan SRG Ikan. Pengembangan SRG ke depan untuk komoditi apa saja? Apakah akan lebih fokus ke komoditi ekspor?*

Sidharta Utama: Target Bappebti ke depan akan semakin banyak gudang yang dikelola melalui skema SRG, sebab SRG baru akan memberikan dampak positif kepada masyarakat kalau semakin banyak jumlah gudang SRG. Saat ini gudang SRG ada yang dibangun dikelola oleh pemerintah jumlahnya 123 gudang. Ditambah dengan yang dikelola pemda, dan kementerian lainnya totalnya ada 135 gudang SRG di seluruh Indonesia. Sedangkan gudang yang dikelola swasta jumlahnya ada 49 gudang SRG. Jadi total di seluruh Indonesia ada 184 gudang SRG.

Bappebti menginginkan jumlah ini terus meningkat secara signifikan di masa depan, terutama yang dikelola oleh swasta. Sebab dari swasta sudah ada gudangnya, sehingga pemerintah tidak harus melakukan investasi dari APBN untuk membangun gudang.

Terkait dengan komoditi, Bappebti juga akan terus menambah komoditi yang dapat dikelola dengan SRG. Tentu sebelum itu harus dikaji terlebih dulu apakah komoditi tersebut cocok untuk dikelola dengan SRG. Misalnya, komoditi tersebut harus tahan disimpan di dalam gudang minimal selama 3 bulan. Untuk beberapa komoditi diperlukan mesin pendingin atau *freezer*. Itu diterapkan untuk bawang merah.

Berdasarkan hasil kajian Bappebti, kami mengusulkan kepada Menteri Perdagangan agar kedelai dan gula kristal putih dapat ditetapkan agar bisa dikelola sebagai komoditi SRG. Untuk bawang putih dan cabai merah saat ini masih dalam kajian Bappebti.



Foto: Bagian KIP

Untuk gudang yang dikelola pemerintah sebanyak 123 gudang SRG ini akan dioptimalkan penggunaannya. Jadi banyak gudang yang belum menghasilkan transaksi, belum menerbitkan resi dan belum memberikan pembiayaan bagi petani.

Buletin Bappebti: *Mengenai Pasar Lelang Komoditi (PLK) terpadu, dengan teknologi sistem informasi yang makin berkembang yang memungkinkan komunikasi lebih cepat, apa target yang akan disasar oleh Bappebti?*

Sidharta Utama: Betul PLK saat ini sudah ada sistem informasinya yang dapat digunakan untuk melakukan lelang komoditi. Ini sangat cocok apalagi pada masa pandemi Covid-19, lelang tetap dapat dilaksanakan secara *online*. Peserta tidak harus datang secara fisik, sehingga bisa berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan begitu potensi pasar lelang semakin besar.

Selain aplikasi *online* banyak hal yang berpengaruh terhadap suksesnya penyelenggaraan lelang komoditi. Yang penting untuk suatu komoditi sudah ada jalur distribusinya. PLK akan menarik bagi si pembeli dan penjual jika pasar lelang ini dapat memperpendek jalur distribusinya. Kalau jalur distribusinya sudah efisien yang tidak cocok di-PLK-kan tidak ada manfaatnya. Untuk itu harus

dilihat bagaimana jalur distribusinya selama ini, kemudian ditetapkan komoditas yang memang memiliki potensi jalur distribusinya diperpendek.

Saat ini PLK dilaksanakan dengan menggunakan dana Dekonsentrasi oleh Pemda. Selama ini Pemda melakukan PLK sendiri. Ini yang kami dorong agar dapat dilakukan pihak swasta yang kemudian dapat menentukan komoditas unggulannya yang dapat mendekatkan pembeli dan penjual.

Buletin Bappebti: *Terakhir, untuk pengembangan dan peningkatan SDM di dalam Bappebti sendiri apa yang akan dilakukan Bappebti tahun 2021 ini untuk menjawab tantangan yang dihadapi?*

Sidharta Utama: SDM memang memiliki peran yang sangat penting di Bappebti. Sebab pada akhirnya semua target yang sudah ditentukan muaranya adalah para pelaksana yakni aparaturnya Bappebti di lapangan.

Oleh karena itu, Bappebti menyiapkan berbagai program peningkatan kompetensi baik secara teknis maupun sikap bagi para aparaturnya. Kompetensi teknis contohnya, bagian pengawasan PBK harus kuat dalam bidang audit dan sangat paham bagaimana transaksi PBK dijalankan. Begitu juga pengawasan di bidang SRG dan PLK, si pengawas dan pembina harus sangat kuat di bidang logistik, pemasaran dan distribusi.

Kemudian kompetensi sikap, yang kami ingin tumbuhkan adalah profesional adaptif dan inovatif. Artinya, aparaturnya Bappebti harus terbuka terhadap perubahan dan berorientasi pada inovasi baru. Inilah yang akan dikembangkan Bappebti ke depan, tidak hanya setahun dua tahun tapi memerlukan pengembangan terus menerus.

Kami akan intensifkan berbagai pelatihan dan *workshop*, selain kami juga mengembangkan budaya mutu dalam bentuk implementasi ISO yang relevan.

Masuknya Komoditi Ayam Karkas Beku Dalam SRG



Ayam adalah produk makanan kaya protein yang menjadi favorit hampir setiap keluarga terutama anak-anak. Untuk mengonsumsi produk ayam berkualitas, ayam karkas beku adalah salah satu pilihan bijak. Produk ayam karkas ini merupakan ayam broiler yang telah dipisahkan dari kepala, ceker dan jeroannya. Ukuran per ekornya sekitar 700–800 gram dengan harga mulai Rp28 ribu per kilo.

Dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi surplus antara tingkat produksi dibandingkan dengan tingkat konsumsi masyarakat. Data Kementerian Pertanian menunjukkan pada tahun 2019, produksi ayam ras nasional 2,5 juta ton dengan konsumsi nasional 1,4 juta ton. Pada 2020, produksi ayam sedikit meningkat menjadi 2,7 juta ton. Sedangkan konsumsi nasional tetap stabil di angka 1,4 juta ton.

Melihat terjadinya surplus ayam potong nasional, maka Sistem Resi Gudang (SRG) untuk komoditi ayam beku dirasakan menjadi hal yang penting. Pasalnya, harga ayam akan sulit terkontrol apabila terus terjadi surplus, dan akhirnya peternak yang dirugikan dengan harga ayam yang turun. Namun selama ini komoditi ayam karkas beku belum bisa memanfaatkan SRG, karena gudangnya yang belum tersedia.

Nah, melihat peluang ini PT Atma Mulya Jaya (PT AMJ) segera membangun gudang berpendingin (*cold storage*) berkapasitas 60 ton dengan luas 216 meter persegi. Dari jumlah itu sebanyak 20 ton dimanfaatkan untuk gudang SRG. Gudang SRG yang terletak di Bekasi ini dilengkapi dengan fasilitas *blasting* untuk pembekuan, gudang untuk penyimpanan filet, dan gudang untuk penyimpanan karkas.

PT AMJ juga telah memiliki rekomendasi dari Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi berupa Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner, yaitu nomor registrasi unit usaha produk hewan sebagai bukti telah dipenuhinya persyaratan higienis dan sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan. Selain itu, PT AMJ telah menjadi pemasok kebutuhan permintaan hotel, restoran, dan catering (horeka) serta BUMD DKI Jakarta, PD Dharma Jaya.

Selain PT AMJ, SRG dengan komoditi ayam karkas beku ini juga dilaksanakan oleh PT Arwinda Utama di Cianjur, Jawa Barat. Peresmian dilakukan oleh Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, pada 28 Desember 2020.

Beroperasinya resi gudang untuk komoditi ayam karkas beku, merupakan angin segar bagi para peternak ayam. Diharapkan keberadaan SRG ayam karkas beku di Bekasi dan Cianjur menjadi embrio bagi pelaksanaan SRG komoditas ayam karkas beku di daerah lainnya.

Dengan pemanfaatan resi gudang untuk komoditi ayam karkas beku ini harga ayam akan terjaga. Pada akhirnya akan memberikan dampak positif kepada para peternak serta para pelaku SRG ayam karkas beku lainnya.



Tekan Risiko Perdagangan Aset Kripto dan Kembangkan Potensinya



Richard Win Putra

Dosen Information System
BINUS University

Cryptocurrency menjadi topik yang cukup kontroversial pada awal kemunculannya, dimana mayoritas negara-negara di dunia melarang *cryptocurrency* menjadi alat untuk pembayaran dan menggantikan mata uang negara. Di Indonesia sendiri, *cryptocurrency* dikategorikan sebagai komoditi dan berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Sebagai komoditi, masyarakat (Pelanggan Aset Kripto) dapat membeli, menyimpan, dan menjual aset kripto melalui Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang terdaftar di Bappebti.

Hingga 19 Juni 2020, sebanyak 13 perusahaan telah terdaftar di Bappebti sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto. Angka ini menunjukkan pertambahan, terutama sejak pertama kalinya diterbitkan regulasi mengenai aset kripto melalui Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Peraturan ini kemudian diperbaharui melalui Perubahan Peraturan yang berlaku mulai 26 Juli 2019.

Munculnya regulasi aset kripto memberikan sinyal baik bagi para pelaku pasar aset kripto di Indonesia. Dengan kepastian hukum yang lebih baik, perkembangan transaksi aset kripto juga diharapkan dapat terus meningkat. Dalam regulasi tersebut, kehadiran Pedagang Fisik Aset Kripto juga didukung oleh kehadiran bursa (Pasar Fisik Aset Kripto) yang didampingi oleh lembaga kliring berjangka dan pengelola tempat penyimpanan.

Dengan adanya bursa kelak, pedagang aset kripto dapat mengambil harga acuan (*price reference*) dari bursa sebagai *static price limits* dari harga aset kripto yang

dijual ke pelanggan. Selain itu, kehadiran bursa juga dapat membantu pemerintah, dalam hal ini Bappebti, untuk mengawasi dan melihat potensi dari perputaran transaksi aset kripto di Indonesia.

Tantangan paling besar dalam skema perdagangan aset kripto tentunya berkaitan dengan teknologi. Pada dasarnya, aset kripto berada dalam *platform blockchain* publik dan bersifat terbuka, sehingga mekanisme transaksi sangat berbeda dengan proses jual-beli aset umum. Sebagai contoh, pada aset kripto seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, dan lainnya, kita umumnya memerlukan sebuah *crypto wallet* dan *private key* untuk menyimpan dan mengelola aset kripto yang telah kita beli. Maka, pedagang aset kripto yang memfasilitasi pembelian dan penjualan aset kripto biasanya menyediakan *crypto wallet* dan *private key* untuk menyimpan aset yang dimiliki oleh pelanggan.

Dalam kasus seperti ini, pedagang memiliki risiko cukup besar, karena secara langsung bertanggung jawab akan aset milik pelanggan. Jika pelanggan ingin mengirimkan asetnya yang berada di *crypto wallet* ke *wallet* mereka sendiri, pedagang akan berperan sebagai *transmitter* dan bertanggung jawab akan risiko terjadinya kesalahan transaksi.

Risiko tersebut tentu telah dipertimbangkan oleh pedagang aset kripto dengan rencana mitigasi risiko yang sesuai. Terdapat pula serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pedagang aset kripto resmi, terutama terkait modal dan ekuitas minimum. Namun tidak dapat dipungkiri, ancaman akan keamanan aset kripto akan selalu ada di era keterbukaan digital seperti sekarang ini.

Siapa Pejabat Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi

Pada tanggal 27 Juli 2020 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahyo Kumolo, mengeluarkan Peraturan Menteri PAN-RB nomor 56 tahun 2020 tentang jabatan fungsional Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Peraturan ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang pemeriksaan perdagangan berjangka komoditi (PBK), serta untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Dijelaskan bahwa Pejabat Fungsional Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Pemeriksa PBK adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan di bidang perdagangan berjangka komoditi dan sistem resi gudang dan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan, serta fasilitasi substansi di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditi.

Dalam Pasal 3 disebutkan Jabatan Fungsional Pemeriksa PBK merupakan jabatan karier PNS dengan jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:

- Pemeriksa PBK Ahli Pertama
- Pemeriksa PBK Ahli Muda
- Pemeriksa PBK Ahli Madya
- Pemeriksa PBK Ahli Utama



Melalui peraturan ini dijelaskan mengenai ruang lingkup tugas, fungsi dan wewenang jabatan Pemeriksa PBK. Dalam Pasal 6 disebutkan Tugas Pemeriksa PBK yaitu melakukan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan di bidang PBK (Perdagangan Berjangka Komoditi) dan SRG (Sistem Resi Gudang) dan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan, serta fasilitasi substansi di bidang PBK, SRG, dan PLK (Pasar Lelang Komoditi).

Dalam peraturan ini juga dijelaskan tentang karier yang dapat ditempuh oleh PNS dalam bidang ini, termasuk pengangkatan dan perpindahan jabatan, pengangkatan melalui promosi, dan *inpassing* (penyesuaian), dengan tetap mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki. Juga diatur mengenai penilaian kerja, kenaikan pangkat, termasuk pemberhentian dari jabatan.

Terkait dengan peraturan ini Permen PAN-RB ini, Kementerian Perdagangan sudah mengeluarkan Permendag nomor 77 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) tanggal 30 September 2020.

Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui :
<http://jdih.kemendag.go.id/pdf/Regulasi/2020/PERMENDAG%20NOMOR%2077%20TAHUN%202020.PDF>



PERSEBARAN PASAR LELANG KOMODITAS



9 Pasar Lelang Komoditas

Daerah diselenggarakan oleh Dinas yang membidangi perdagangan



6 Pasar Lelang Komoditas

Swasta Murni



6 Pasar Lelang Komoditas

Daerah sudah melakukan revitalisasi

*Keterangan

MKG: PT Meukat Komoditi Gayo

IPASAR: PT Ipasar Indonesia

ACM: PT Asia Commodity Marketplace

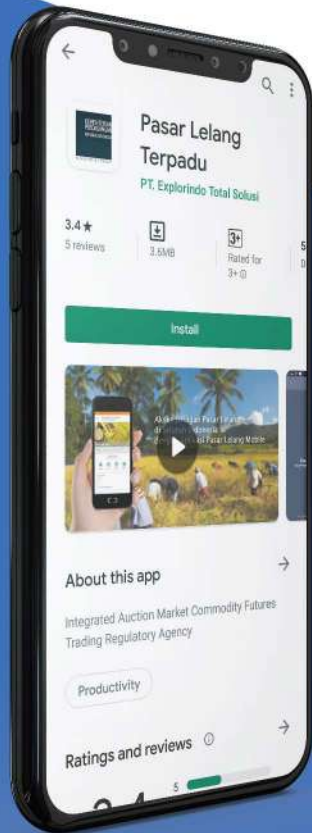
PKJ: PT Pasar Komoditas Jakarta

POSINDO: PT Pos Indonesia

APCM: Asia Pacific Commodity market

APLIKASI

Pasar Lelang Terpadu Google Play



Untuk memudahkan pelaku usaha dalam melakukan transaksi lelang, maka Bappebti telah membangun Aplikasi **Pasar Lelang Terpadu** yang dapat diunduh melalui Google Play.

Melalui Aplikasi **Pasar Lelang Terpadu**, maka penawaran lelang cukup dilakukan dengan menggunakan *smartphone* berbasis Android.

Download sekarang

